# JAWA TENGAH

### **Sumur Warga Desa Jungkare Ambles**

KLATEN (KR) - Sebanyak 13 sumur di Desa Jungkare Kecamatan Karanganom, Klaten, ambles. Untuk mengetahui penyebab secara pasti, kini BPBD Klaten meminta kepada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta ESDM Jateng untuk turun tangan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Yuwana Haris, yang merupakan alumni Departemen Teknik Geologi UGM menduga kejadian amblesnya sumur-sumur milik warga di Jungkare akibat kondisi lapisan bawah tanah labil, ditambah adanya curah hujan yang tinggi. "Itu dugaan saya, namun untuk kepastiannya perlu kajian ilmiah. Jadi kami kirimkan surat ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dengan tembusan ESDM Propinsi Jateng. Saya juga minta teman-teman sesama alumni UGM untuk membantu,î kata Yuwana Haris, Rabu (17/2).

Dijelaskan, warga sudah diminta untuk memasang pengaman di sekitar lokasi kejadian. Sebanyak lima sumur sudah ditimbun agar tidak menimbulkan dampak pada bangunan sekitar. Sebanyak 13 sumur yang ambles tersebut adalah milik Parjiman (65), Sihono (43), Iksan (43), Harvanto (42), Sugiharjo (70), Suroto (40), Langgeng Utomo (45), Nursalim (38), Danang (41), Tulus (56), Wahid hasim (42), Sriyanto (68), dan sumur milik Slamet (42), semuanya berada di wilayah RW 04 dan RW 05. Fenomena sumur ambles di Jungkare tersebut terjadi dalam sepuluh hari terakhir. Yakni pada rentang waktu dari tanggal 7 Februari hingga 17 Februari 2021.

### Pelantikan Bupati Kebumen Ditunda

KEBUMEN (KR) - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Terpilih dalam Pilkada 2020, ditunda hingga akhir Februari 2021. Sebelumnya, pelantikan dijadwalkan 17 Februari 2021. Nantinya sampai hari pelantikan, Sekretaris Daerah (Sekda) akan ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) bupati. Penundaan pelantikan disampaikan Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono seusai mengikuti rapat terbatas di Rumah Dinas Wakil Bupati Kebumen, Senin (15/2) malam. "Penundaan pelantikan berdasarkan hasil rapat bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik melalui aplikasi Zoom, Senin (15/2) sore. Pelantikan direncanakan antara tanggal 25 hingga 27 Februari 2021," jelas.

Menurut Ujang, dalam rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, penundaan pelantikan calon kepala daerah terpilih terjadi di 207 kabupaten/kota. "Penundaan pelantikan untuk kebersamaan. Nantinya, pelantikan akan dilaksanakan bersama dan bertahap secara virtual," ujar Ujang. Hingga hari pelantikan, Sekda Kebumen akan ditunjuk sebagai Plh Bupati Kebumen. Pasalnya, Bupati Kebumen saat ini, yakni KH Yazid Mahfudz, habis masa jabatannya pada 17 Februari 2021. "Pada 17 Februari 2021, akan dilaksanakan penyerahan memori jabatan oleh bupati definitif kepada pelaksana harian bupati," terangnya. Bupati terpilih, Arif Sugiyanto, memahami penundaan pelantikannya. (Suk)

#### **Dosen Perlu Tulis Jurnal Internasional**

SEMARANG (KR) - Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) menggelar workshop tentang penulisan jurnal internasional bagi para dosen di lingkungan FE Unimus (Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi), Rabu (17/2). Workshop menampilkan dua nara sumber utama vaitu Dr Hersugondo SE MM dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip) dan Dr Imang Dapit Pamungkas SE MSi Akt CA CIBA (dosen FE Udinus). Dekan FE Unimus Dr Khaerudin MM MT saat membuka workshop menyatakan workshop sebagai upaya mendukung kewajiban dosen untuk melakukan penelitian dan menulis di jurnal internasional bereputasi.

Juga salah satu cara mendorong dosen untuk meneliti dan menulis jurnal internasional scopus. "Setelah mengikuti workhsop diharapkan, satu dosen bisa menghasilkan minimal satu penelitian dan satu jurnal internasional scopus setiap tahunnya." uiar Khaerudin. Dr Hersugondo SE MM dan Dr Imang Dapit Pamungkas SE MSi Akt CA CIBA menyampaikan perlunya dosen yang selama ini kurang meneliti mau mulai fokus ke penelitian yang dalam luarnya pasti salah satunya penulisan jurnal internasional. Dosen terutama PTS seyogyanya tidak hanya mengandalkan dana penelitian dari internal saja karena skema dan pendanaan dari DRPM Dikti sangat terbuka dan sangat banyak.



Dekan FE Unimus (kanan) bersama 2 narasumber saat mengisi workshop.

## Ganjar Buka UKM Virtual Expo

SEMARANG (KR) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Jateng menggelar UKM Virtual Expo (UVO) 2021. Acara yang digelar 16-18 Februari dengan tema Wonderfood UKM, Kudu Setrong-Say No To Nglokro, bertujuan untuk menggejot ekonomi. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Rabu (17/2) di Semarang, menyampaikan UVO 2021 diikuti 150 pelaku UKM unggulan Jateng khusus makanan dan minuman. "Tahun lalu UVO sudah berjalan. Ini kami lanjutkan karena respons masyarakat cukup tinggi. Harapannya, para pelaku UKM tidak nglokro.

Mereka harus punya semangat meski kondisi tidak menentu. Kami membantu mencarikan jalan ke luar, salah satunya dengan acara ini," ujar Ganjar. UVO merupakan ikhtiar pemerintah untuk mendorong agar UKM Jateng bangkit dan berkembang. Dengan cara virtual justru bisa meningkatkan penjualan. "Hari ini baru saya buka, sudah ada transaksi sebesar Rp 15 juta. Ini lumayan, karena ini hanya produk makanan dan minuman. Jadi, ini akan terus kami dorong agar para pelaku UKM di Jateng siap bermigrasi ke pasar digital dan marketnya menjadi lebih banyak," imbuhnya. (Bdi)

#### MENPARECRAF SANDIAGA SALAHUDIN UNO

# Saatnya Masjid sebagai Pusat Ekonomi Kreatif

SEMARANG (KR) - Masjid sebagai salah satu khazanah penting umat Islam, susah saatnya dijadikan pusat ekonomi kreatif, pembinaan masyarakat, tidak sekadar sebagai tempat ibadah. "Kita harus mampu menjadikan masjid sebagai sentral ekonomi kreatif. Maka ke depan harus terus berinovasi, berkolaborasi dan beradaptasi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Salahudin Uno.

Sandiaga Uno mengatakan hal itu saat menjadi nara sumber di acara webinar nasional yang diselenggarakan pengurus Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Rabu (17/2). Webinar bertajuk 'Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat'. Selain Sandiaga Uno, acara yang dimoderatori Prof Dr Ahmad Rofiq MA itu juga menghadirkan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) HM Jusuf Kalla, Ketua Baznas Prof Dr KH Noor Ahmad, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng Pribadi Santoso.

Hadir pula Ketua DMI Ja-

teng KH Achmad, Ketua MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, pimpinan Bank Syariah Indonesia Semarang Imam Hidayat Sunarto, dan sejumlah tokoh lainnya. Sebelum webinar dimulai, dilakukan penandatangan MoU antara Ketua DMI Jateng Drs KH Achmad dengan Regional CEO Semarang Bank Syariah Indonesia Imam Hidayat Sunarto, terkait konsep pengelolaan keuangan digital yang akan diterapkan pada masjidmasjid di Jateng yang berjumlah 48.900 masjid dan 88.000 musala.

Pada kesempatan itu, Sandiaga Uno menyampaikan materi tentang 'blueprint pengembangan wisata religi dan ekonomi kreatif berbasis masjid'. Menurut Sandiaga, posisi masjid, sebagai komponen pembentukan peradaban manusia. "Sebagian besar masjid-masjid yang dibangun sebelum Abad 15 Masehi masih berdiri megah dan kokoh hingga sekarang. Ini patut kita syukuri," terangnya.

Selain itu, pada perkembangannya masjid juga menjadi identitas suatu kota atau daerah hingga saat ini, seperti di Kota Banda Aceh ada Masjid Baiturahman, Masjid Agung Demak di Kabupaten Demak, dan sejumlah masjid bersejarah lainnya. Umumnya masjid menjadi tempat ibadah sekaligus tempat ziarah seiring perkembangan yang ada.

Ketua DMI Pusat Jusuf Kalla mengajak masyarakat terlibat aktif memajukan umat melalui pemberdayaan masjid. Menurut Jusuf Kalla,

dalam memakmurkan masjid misalnya turut serta membangun masjid, memelihara, salat berjamaah. Semua itu, kata dia, salah satu upaya untuk memakmurkan masjid. Ditambahkan, masjid memiliki banyak fungsi, selain sebagai fungsi ibadah, juga sebagai pusat pendidikan, ekonomi umat,

pembinaan masyarakat, dan hal penting lainnya.

Sekretaris MAJT Kiai Muhyiddin MAG berharap dari webinar nasional ini dapat mengedukasi para pengelola masjid, umat dan jemaat untuk tetap berinovasi dalam mencari solusi dalam menghadapi permasalahan ekonomi umat.



Penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DMI Jateng KH Achmad dengan Regional CEO Semarang Bank Syariah Indonesia Imam Hidayat Sunarto sebelum dimulai webinar.

# Dikeluhkan, Tambak Udang di Tanah Negara

**PURWOREJO** (**KR**) - Pemerintah Desa (Pemdes) Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo mendatangi kantor DPRD setempat, Selasa (17/2) siang. Mereka mengeluhkan beroperasinya usaha tambak udang di tanah GG atau tanah negara bebas seluas 17 hektare di pesisir desa itu.

Tambak dinilai menyebabkan pencemaran dan merusak lahan pertanian. Kepala Desa Wero Suyoto memimpin rombongan sejumlah perangkat desa itu. Selain mengungkapkan persoalan yang terjadi di Wero, pemdes juga meminta anggota Komisi I dan II DPRD mendampingi mereka dalam menyelesaikan persoalan itu.

Suyoto mengatakan, pemanfaatan tanah yang berujung penyalahgunaan dan kini bermuara pada persoalan hukum itu dimulai tahun 2012. "Kepala desa saat itu menyewakan tanah GG seluas 17 hektare selama 20 tahun, untuk usaha budidaya buah naga. Nilai sewa tanah Rp 40 juta/hektare," katanya menjawab pertanyaan KR.

Namun usaha tersebut hanya bertahan dua tahun dan tutup pada 2014. Kemudian, tanpa sepe-

ngetahuan warga tanah GG difungsikan menjadi tambak udang dan dikelola pihak lain. Ketika diputuskan, tidak ada musyawarah dengan pemerintah desa maupun masyarakat. "Warga kecewa kemudian melaporkan dugaan penyalahgunaan itu ke Polres Purworejo dan Kejaksaan Negeri Purworejo. Saat ini kasusnya masih berjalan dan tanah GG itu menjadi barang bukti," ucapnya.

Suyoto berharap usaha tambak udang dihentikan atau diatur pembuangan limbahnya. Menurutnya, pemdes dan masyarakat tidak merasakan manfaat dari adanya usaha tersebut. Selain itu, keberadaan tambak udang dinilai merugikan budidaya pertanian petani Wero. Bahkan, sekitar 40 persen dari 18 hektare sawah vang bersebelahan dengan tanah GG, tidak dapat ditanami padi.

Ketua Komisi II DPRD Purworejo Tunaryo meminta pemkab segera turun menelaah persoalan yang terjadi di Desa Wero. Langkah cepat, katanya, harus dilakukan untuk meredam gejolak sehingga tidak meluas. Pemdes, memang kesulitan mengingat persoalan tanah GG ada di luar kewenangan desa. "Akan segera ditindaklanjuti dan kami berharap pemkab hadir di tengah masyarakat membantu mengatasi persoalan di Wero. Aspirasi itu akan kami sampaikan kepada Ketua DP-RD," tandasnya.

# Masa Jabatan Bupati Boyolali Berakhir

BOYOLALI (KR) - Masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali periode 2016-2021, Seno Samodro dan M Said Hidayat res-(17/2). Di tengah masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menggelar acara pelepasan Seno Samodro, bertempat di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali secara sederhana yang hanya dihadiri undangan terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (pro-

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali Masruri menilai bahwa se-

jak dipimpin Seno Samodro, Kabupaten Boyolali semakin maju dan sejahtera. "Sehingga Boyolali menjadi kota yang bagus, mi berakhir pada hari Rabu kabupaten yang bagus, masyarakatnya tentram pada kepemimpinan beliau," kata Sekda Masruri. Selama masa kepemimpinan Seno Samodro, telah banyak pembangunan fisik dan non fisik yang berhasil diwujudkan. Antara lain yakni pembangunan Kompleks Perkantoran Terpadu di Kelurahan Kemiri yang dilengkapi dengan lima tempat ibadah. Ada pula Simpang Siaga yang berada tepat di jan-

tung Kota Susu dengan rut membangun di berba-Patung Arjuna Wijaya di tengahnya.

Selain itu, Seno Samodro telah mewujudkan pembangunan Kebun Raya Indrokilo Bovolali (KRIB) sebagai tempat konservasi ribuan tanaman dan pohon langka yang dimanfaatkan untuk penelitian, wisata, edukasi dan penyediaan ruang terbuka hijau. Seno Samodro juga telah membangunan Alun-alun Kidul dan Alun-alun Lor sebagai tempat ruang publik yang representatif untuk masyarakat Boyolali.

Selain pembangunan fisik, Seno Samodro juga tu-

gai sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan sektor

ekonomi yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



KR-Mulyawan

Seno Samodro dalam acara pelepasan di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali.

# Manfaatkan Lahan sebagai Sumber Pangan

KEBUMEN (KR) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kebumen bersama dengan berbagai pihak, mengajak masyarakat mengoptimalkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami sayuran maupun buah-buahan. Ajakan dilakukan melalui tanam bersama memanfaatkan lahan sekitar peternakan New Assa yang ada di Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan. Kegiatan yang berlangsung Rabu (17/2), masih dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan HUT ke-75 PWI. Tanam bersama dengan menanam tanaman hortikultura, melibatkan Dinas Pertanian dan Pangan (Distapang), Camat Pejagoan Farita Listiyaningsih dan jajarannya, jajaran Polsek dan Koramil Pejagoan, serta dari kalangan swasta PT Charoen Pokphand Indonesia Cabang Kebumen, dan SKN Group.

"Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar pada banyak sektor, termasuk ketahanan pangan di level keluarga. Memanfaatkan lahan yang ada sebagai sumber pangan, menjadi salah satu solusi menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi Covid-19," terang Wakil Ketua PWI Kebumen, Nanang WD, dan Sekretaris PWI Kebumen, Supriyanto, di sela-sela tanam bersama. Memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan, tidak hanya mampu mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga, namun juga menjanjikan sebagai sumber pendapatan keluarga.



Tanam bersama memanfaatkan lahan yang ada sebagai sumber pangan.



SEMARANG (KR) - Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto khawatir jumlah penduduk miskin di Jateng melonjak akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama satu tahun. Apalagi jumlah masyarakat yang terpapar covid masih cukup tinggi. Diakui pandemi Covid-19

memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun perekonomian Ja-

Karena itu, Komisi E DPRD Jateng mendukung penuh upaya Pemprov Jateng untuk menekan penyebaran Covid-19. Diharapkan langkah yang diambil dalam penanganan Covid-19 pada tahun kedua pandemi Covid-19 ini harus lebih tepat. Harapannya, masyarakat segera terhindar dari ancaman bahaya virus ko-

Artinya, penanganan pandemi Covid-19 harus berjalan seimbang antara sisi kesehatan dan perekonomian, karena kedua sektor tersebut menjadi kebutuhan pokok masyarakat, terutama ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Begitu beratnya ekonomi masyarakat di masa pandemi ini, dikhawatirkan akan terjadi lonjakan angka kemiskinan di Jateng akibat pandemi Covid 19 ini.

Berdasarkan data dari BPS Jateng, ada lonjakan penduduk miskin di provinsi ini



per Maret 2020 Ialu. Pada periode itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jateng mencapai 3,98 juta orang (11,41 persen) bertambah sebanyak 301.500 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang (10,58 persen).

Yudi Indras Wiendarto

Yudi sepakat masyarakat miskin diberikan subsidi. Agar tepat sasaran maka bisa menyasar pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah berupa kebutuhan pokok, seperti biaya listrik, air, atau biaya pendidikan.

Subsidi kebutuhan pokok dinilai akan lebih mengena jika dibandingkan dengan bantuan sembako. Bantuan sembako bisa tetap dilakukan namun sumbernya dari pelaku usaha atau perusahaan.

Pemberian subsidi bagi masyarakat harus dibarengi dengan kewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Bahkan penerima subsidi bisa dikenai sanksi jika melanggar protokol kesehatan. (\*)

(Disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)